

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penerapan prinsip *good governance* pada kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya sudah bisa terbilang cukup bagus, baik itu dari sudut pandang pegawai BAPOD, dari kelurahan dan kecamatan, dan juga dari sudut pandang masyarakat. Seperti adanya partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan tugas mereka dalam hal penyediaan sumber data. Seperti supremasi hukum dan akuntabilitas yang sudah terlaksana sesuai perda walaupun ada pelanggaran kecil yang masih bisa dimaklumi seperti pegawai yang terlambat masuk kantor.

Kemudian terkait daya tanggap, orientasi pada konsensus dan kesetaraan juga sudah diterapkan dengan baik, dimana mereka selalu cepat tanggap ketika ada pengaduan permasalahan yang datang ke BAPOD tanpa pandang bulu dan bersifat menyeluruh yang berorientasi pada warga Kota Surabaya terlebih dahulu, kemudian langsung dikoordinasikan dengan perangkat daerah maupun dinas yang berkaitan dengan masalah yang ada di masyarakat untuk proses penyelesaiannya. Untuk efektifitas dan visi strategis juga sudah terlaksana sesuai dengan konsep *good governance* dimana semua tugas terselesaikan sesuai tupoksi dari organisasi yang telah ditentukan. Dari segi akuntabilitas juga cukup baik dimana setiap ada kegiatan pasti ada laporan kegiatannya dan juga ketika ada pengeluaran anggaran juga tentunya ada SPJ nya untuk bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat..

Namun ada 2 prinsip yang tidak diterapkan dengan baik disana yaitu transparansi dan efisiensi, seperti akses informasi yang terbatas kepada masyarakat karena hanya aplikasi SITOMAS saja yang bisa diakses oleh masyarakat dengan alasan aplikasi yang lain berkaitan dengan data internal, bahkan masyarakat saja juga tidak paham terkait transparansi dari pemkot. Kemudian untuk efisiensi terkadang banyak tugas yang tumpang tindih karena ada banyak pengaduan masyarakat yang datang ke kantor BAPOD padahal itu bukan tugas dan wewenang mereka, akibatnya banyak tugas yang tidak terselesaikan sesuai deadline. Ditambah lagi masalah jaringan dan juga terbatasnya komputer yang mengakibatkan terhambatnya kinerja dari tim BAPOD sendiri.

5.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang ada saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan penerapan prinsip good governance pada kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya (BAPOD) adalah :

- 1) Untuk prinsip efisiensi, kepada Kepala BAPOD harus bisa lebih tegas lagi dalam hal pengambilan keputusan, jikalau ada tugas tambahan dari Walikota mungkin bisa meminta bantuan kepada instansi maupun dinas lain agar tidak menghambat dari tugas dan fungsi pokok dari BAPOD sendiri. Dan juga bisa menambah jumlah komputer dan kecepatan jaringan yang ada agar pekerjaan bisa lebih cepat terselesaikan.
- 2) Untuk transparansi setidaknya BAPOD harus memberikan akses informasi mengenai setiap kegiatan yang mereka lakukan kepada masyarakat, minimal selalu update setelah melakukan kegiatan pada web instansi BAPOD tujuannya agar masyarakat tahu cara kerja mereka itu seperti apa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2019). *BAB III METODOLOGI PENELITIAN*. <http://repository.ummat.ac.id/505/3/COVER-BAB20%III.pdf> (diakses pada 28 Maret 2021)
- Afifah. I. D (2020). *BAB II TINJAUAN PUSTAKA*. <http://repository.stiedewantara.ac.id/1350/4/BAB%20II.pdf>. (diakses pada 25 Maret 2021)
- Almas, Y. A., & Andayani, A. (2020). Implementasi Good Governance dan Single Window dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi UPTSA SIOLA. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 9(4).
- Apriliani, S. (2018). *BAB II KAJIAN PUSTAKA*. <http://repository.unpas.ac.id/37168/3/BAB%20II.pdf>. (diakses pada 25 April 2021)
- Astuti, A. D., & Muna, A. (2019). Implementasi Good Governance pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Kelitbangan. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, Vol. 4(2).
- Astuty, S., Setyastuti, Y., Maulina, N., & Hanief, L. (2018). Analisis Fungsi dan Peran Humas dalam Upaya Implementasi Good Governance (Studi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin). *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, Vol.2(1).
- Badan Pusat Statistik (2018). Data Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Surabaya. <https://bps.go.id>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol.11(1), 1-11.
- Pramudya, A. S. (2017). Implementasi Konsep Good Governance dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

- Rinjani, T. A. (2017). *BAB III METODOLOGI PENELITIAN*. http://repository.upi.edu/29754/6/S_PKN_1305444_Chapter3.pdf (diakses pada 28 Maret 2021)
- Sari, S. (2020). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1(5), 271-278.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Standart Kepuasan Masyarakat (2016). Survey Hasil Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Kota Surabaya.
- Tamawiwi, F., Lumolos, J., & Undap, G. (2017). Implementasi Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2(2).
- United Nations Development Programme, 1999, 'Decentralization: A Sampling of Definitions', Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance, Working Paper.